



Pegawai Negeri Keluhkan Belum Terima

TKD

JAKARTA — Lurah Gondangdia, Jakarta Pusat, Susan Jasmine Zulkifli, mengatakan sampai kini belum menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) akibat kisruh APBD 2015. "Kalau gaji kan langsung dari negara jadi lancar. Cuma tunjangan saja terhambat," kata dia saat ditemui di kantornya kemarin.

Kekacauan tersebut merupakan imbas dari kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015. Menurut dia, sebagian besar pegawai negeri DKI juga mengeluhkan TKD yang tersendat hingga tiga bulan. "Kami hanya bisa berharap kisruh APBD 2015 ini segera selesai," ujar Susan.

Susan mengatakan kondisi tersebut cukup mengganggu, apalagi buat anggota staf. Namun dia memastikan pelayanan masyarakat yang diberikan tidak terpengaruh. "Kalau kami yang penting kerja, kerja, dan kerja, sesuai dengan yang diamanatkan," kata Susan.

Anggota Staf Kependudukan Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat, Basuki Hidayat, mengatakan kisruh antara Ahok dan pimpinan DPRD cukup merepotkan jalannya program kegiatan yang didanai APBD. Namun kegiatan yang bersumber dari pusat tetap bisa berlangsung. "Yang memerlukan dana dari APBD jelas terganggu, pasti banyak yang tertunda," kata Basuki.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan keterlambatan tunjangan itu dapat mempengaruhi kinerja pegawai. "Ya, kalau tidak digaji sebulan pasti mempengaruhi kinerja, kan? Ya, pasti berpengaruh, apalagi mereka diminta kerja cepat dalam pelayanan kepada masyarakat," kata dia kemarin.

Menurut Agus, belum cairnya APBD 2015 juga berdampak terhadap program atau kegiatan pemerintah. "Tidak ada perbaikan jalan, pembangunan rumah susun, dan program lainnya," ujarnya. Karena itu, dia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan kisruh APBD tersebut.

Keputusannya ada di Mendagri dan tinggal menentukan saja mana yang sesuai. "Karena keduanya (Ahok dan DPRD) saling bertahan, kan," kata dia.

Adapun rencana kenaikan TKD yang dijanjikan Gubernur Ahok, menurut Lurah Susan, sebenarnya melecut kinerja bawahannya. Selama ini basis pemberian tunjangan tidak jelas, sehingga antara anggota staf yang rajin dan malas mendapatkan bagian yang sama. "Kalau dulu pintar atau tidak, penghasilan sama. Sekarang pemerintah menghargai kerja kami," ujarnya.

● AFRILIA SURYANIS | JAYADI SUPRIADIN